PETINGGI DEMOKRAT DI SKK MIGAS

TEMPO

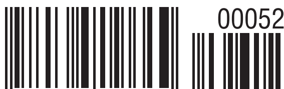
24 FEBRUARI-2 MARET 2014

ASTAGA! LABEL HALAL

Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memperdagangkan label halal. *Tempo* melacak hingga Australia dan Belgia.



RP 33.000
WWW.TEMPO.CO
MAJALAH BERITA MINGGUAN
ISSN: 0126 - 4273



TEMPO, 24 FEBRUARI-2 MARET 2014

PRAKTEK HARAM UNTUK LABEL HALAL

KORUPSI tampaknya telah jadi lakon yang tak kenal tempat dan tak kenal musim. Bahkan, untuk urusan yang menyangkut keyakinan beragama, ada saja orang yang tega mengambil keuntungan pribadi. Perihal label halal—sesuatu yang dipakai untuk memastikan suatu produk makanan tak mengandung bahan yang diharamkan agama—sempat-sempatnya juga dikerjai.



Adalah Majelis Ulama Indonesia yang ditengarai "bermain-main" dengan wewenangnya mengeluarkan label halal. Organisasi yang menghimpun ulama dari pelbagai organisasi Islam ini memang diberi wewenang mengeluarkan label itu. Sedianya, sertifikat itu gratis diperoleh agar tak membebani perusahaan dan tak menyusahkan konsumen. Namun, dalam prakteknya, produsen dikenai biaya pengujian produk makanan dan minuman tanpa ketentuan tarif yang transparan. Walhasil, yang ironis pun terjadi: secarik kertas halal justru diterbitkan dengan proses yang "haram".

Sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar makanan halal yang tak bisa diabaikan. Saat ini pelbagai perusahaan multinasional—pemasok makanan dan minuman dari berbagai penjuru dunia—membutuhkan sertifikasi halal agar produk mereka bisa dijajakan di pasar lokal. Jejaring pasokan dan permintaan pun tercipta. Jasa penyedia sertifikasi tumbuh menjadi bisnis yang gurih.

Ambil contoh daging sapi impor dari Australia dan sejumlah negara lain. Karena ongkosnya yang kelewat mahal, MUI tak mungkin mengawasi proses pengolahan daging di berbagai penjuru tersebut. Apalagi rantai yang diawasi cukup panjang—dari penyembelihan hewan, pengolahan daging, penyimpanan, hingga pengepakan. Dalam seluruh rantai itu, produk tak boleh terkontaminasi bahan yang tak halal.

MUI kemudian bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa sertifikasi di berbagai negara. Nah, di sinilah celah permainan terbuka. Sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang merilis label halal, MUI memegang monopoli perizinan bagi perusahaan yang hendak bermitra. Demi mengantongi izin, perusahaan sertifikasi di Australia, menurut laporan *The Sunday Mail*, Brisbane, Oktober tahun lalu, memberi "hadiah" kepada MUI yang nilainya mencapai Aus$ 78 juta atau sekitar Rp 820 miliar. Padahal resminya tak boleh ada ongkos seperak pun dipungut dari perusahaan pemberi sertifikat.

Memberi suap, kinerja perusahaan pemberi label halal itu tak pernah diaudit. Di Melbourne, daging halal dan nonhalal dikemas pada tempat yang sama. Pemisahan hanya dilakukan berdasarkan waktu kerja karyawan.

Kondisi ini diperburuk oleh tak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang drafnya telah dibuat pada 2009. Semestinya aturan itu bisa menjadi pedoman tentang apa dan bagaimana sertifikasi halal dilakukan. Salah satu pemicu perdebatan adalah status sertifikasi: sukarela atau kewajiban. Kalangan industri berkeberatan jika hal ini diwajibkan. Dalam sebuah kesempatan, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia menyebutkan pengurusan label halal ini memberatkan pengusaha. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia memang menetapkan tarif administrasi Rp 6 juta per produk. Tapi prakteknya ada biaya lain-lain, yang tak jelas, yang besarnya mencapai puluhan juta rupiah. Akibatnya, tidak hanya konsumen mesti menanggung ongkos, nilai kompetitif produk lokal pun kian tergerus.

Usut tuntas berbagai indikasi penyimpangan tak bisa lagi ditawar. Ke mana saja duit sertifikasi label halal mengalir wajib dipertanggungjawabkan MUI. Transparansi majelis ini, lembaga nonpemerintah yang mendapat hibah APBN dan mengelola dana publik dari sertifikasi halal, mutlak harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Dobrakan besar harus diambil. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pernah mengusulkan label halal diganti dengan sertifikat nonhalal. Maksudnya, bukan tanda halal yang mesti diterakan pada makanan yang tak haram, melainkan makanan haramlah yang harus dipisahkan dari makanan halal. Asumsinya sederhana, sebagian besar makanan di Indonesia sudah diproses secara halal dan menggunakan bahan-bahan yang tak diharamkan. Produk yang tidak halal-lah—misalnya yang mengandung minyak babi atau alkohol—yang harus diberi tanda. Cara ini dinilai lebih praktis dan tak ribet.

Dengan demikian, tak dibutuhkan lembaga semacam MUI untuk memberi label halal. Pemerintah cukup mewajibkan produsen makanan dan minuman menyebutkan kandungan zat dalam produknya. Lalu, secara random, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan dapat mengecek ke lapangan. Label nonhalal dengan sendirinya akan membantu produsen mencapai pasarnya. Pembeli yang ingin mengkonsumsi makanan halal—atau yang haram—akan terbantu dalam mengidentifikasi produk yang mereka butuhkan. ● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 32



SEORANG PETUGAS MERAPIKAN DAGING SAPI BERSERTIFIKAT HALAL DI PUSAT BELANJA CARREFOUR, LEBAK BULUS, JAKARTA, KAMIS PEKAN LALU.



TRANSAKSI MAHAL LABEL HALAL

Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia dan negara lain. Diberi posisi penting pada sebuah perusahaan di Belgia.

TEMPO/ADITIA NOVIANSYAH



KANTOR LP-POM MAJELIS ULAMA INDONESIA, JAKARTA, KAMIS PEKAN LALU.

TEMPO/SETO WARDHANA

EMPAT orang beda bangsa meriung di lobi hotel Rydges Bell City, jantung Kota Melbourne, Negara Bagian Victoria, Australia: Ali Chawk asal Libanon, Mohammed Lotfi keturunan Mesir, Imran Musa dari Singapura, dan Syahrudi Muhammad Idji dari Indonesia. Pada 1 Oktober 2013 sore itu, mereka membicarakan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Chawk dan Lotfi, yang telah menjadi warga negara Australia, adalah pemilik Australian Halal Food Services atau AHFS, perusahaan pemberi label halal bagi produk makanan dan minuman. Enam bulan sebelumnya, MUI mencabut izin halal perusahaan itu. Alasannya: AHFS telah memberi label halal kepada pejagalan yang menyembelih sapi tak sesuai dengan syariah. "Saya ditanya Mister Lotfi, apakah punya jalur ke Nahdlatul Ulama," kata Syahrudi, Wakil Ketua Dewan Dakwah Tangerang, pekan lalu.

Syahrudi berkunjung ke Melbourne untuk urusan lain. Tapi ia bersama Imran juga sedang menyiapkan perusahaan pemberi label halal di Melbourne. Menurut dia, Lotfi bertanya apakah di Indonesia hanya MUI yang berwenang mengesahkan perusahaan label halal di luar negeri. Meski resminya gratis, Lotfi mengatakan telah mengeluarkan uang banyak untuk mengurus izin. Ia menunjukkan bukti transfer ke sejumlah rekening Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah. "Waktu melihatnya, saya kaget sekali," ujar Syahrudi.

Amidhan membidangi urusan ekonomi dan sertifikasi halal di MUI. Bersama Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, tanda tangannya tercantum pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin jika perusahaan dianggap melanggar peraturan MUI.

Imran Musa, Chief Executive Officer ARK Incorporated Singapura, sama terkejutnya melihat bukti-bukti transfer uang dari Lotfi ke Amidhan. "Saya pegang slip-slip itu," katanya. Besarnya bervariasi. Ada transfer Aus$ 3.000 ke rekening Amidhan di Bank Commonwealth pada 27 Maret 2013. Jumlah terbesar Aus$ 10 ribu atau sekitar Rp 105 juta.

Uang-uang tersebut, menurut Lotfi kepada Imran dan Syahrudi, diberikan agar MUI tak mencabut izin Australian Halal Food Services. Pada 14 Maret 2013, Amidhan mengirim surat kepada Lotfi, mengancam akan mencabut izin AHFS. Alasannya, MUI menerima pengaduan 21 lembaga Islam di Australia bahwa

AHFS memberikan sertifikat kepada rumah potong yang menyembelih sapi tak sesuai dengan syariah.

Dalam korespondensi antara AHFS dan MUI berikutnya, Amidhan semakin keras menekan. Ia menyebutkan punya video rumah potong di Melbourne yang tukang jagalnya memotong merih setelah hewan itu mati. Pelanggaran lainnya, pejagalan berada di luar teritori AHFS, yang hanya diizinkan memberi sertifikat kepada pejagalan di Queensland, asal daging yang dijual ke Indonesia.

Chawk dan Lotfi terbang ke Jakarta untuk menemui Amidhan. "Pada Juni atau Juli," kata Amidhan kepada *Tempo*. Izin AHFS telah dicabut pada 1 April 2013. Menurut dia, pertemuan di Jakarta membicarakan kemungkinan Lotfi dan Chawk mendirikan perusahaan sejenis dengan nama berbeda. Amidhan menerima proposal ini. "Pertimbangannya, mereka mau bertobat tak akan mengulang pelanggaran AHFS," ujarnya.

Sejak itu, AHFS pun bersalin rupa menjadi Halal Certification Council. Pegawai, alamat, dan pemiliknya tetap sama. Hanya, Lotfi dan Chawk dilarang masuk struktur perusahaan baru. Di atas kertas, anak Lotfi yang menjadi pemimpin. Adapun Lotfi dan Chawk tetap memimpin AHFS, yang memberi label halal untuk produk ekspor ke Arab Saudi, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Lotfi dan Chawk menolak memberikan konfirmasi tentang pengiriman uang itu. Ketika *Tempo* mendatanginya ke Melbourne, Chawk menyatakan sedang di Libanon untuk menengok ibunya yang sakit. Melalui surat elektronik, Lotfi juga menyatakan tak mau bercerita tentang informasi itu.

■ ■ ■

SEPEKAN di Australia, sejak akhir Januari hingga awal Februari lalu, *Tempo* makin banyak mendapat cerita seputar besel dari para pengusaha label halal kepada petinggi-petinggi Majelis Ulama Indonesia. "Sudah jadi rahasia umum di Australia, untuk mendapat izin, mesti menyuap pejabat MUI," kata Mohamed El-Mouelhy, Presiden Halal Certification Authority, yang berbasis di Sydney.

Mereka mengeluhkan aturan MUI yang memberikan izin berdasarkan teritori negara bagian. Sistem ini dianggap menyuburkan monopoli dan membuat tarif halal tak seragam. Juga aturan kewajiban memberikan "kontribusi" kepada MUI yang tak jelas definisinya, seperti tercantum dalam kontrak antara AHFS dan MUI yang diteken Amidhan dan Lotfi pada 14 Oktober 2009.

Amidhan menyangkal ada kontrak untuk pemberian izin itu. Menurut dia, izin itu diberikan gratis, seperti lembaga ulama negara lain. Kewajiban perusahaan label halal itu hanya membantu syiar Islam di wilayah masing-masing. "Kalau ada kontrak, itu palsu," katanya. "Kami putus hubungan dengan

Statutory Declaration
New South Wales Oaths Act 1900 (as amended)

I, Mohamed EL-MOUELHY, solemnly and sincerely declare that-

- I organised for the following persons to tour Australia:
  1. Mr H Amidhan Shaberah
  2. Mr H Mohammad Ichwan Sam
  3. Mr K H Ma'ruf Amin
  4. Drs H Slamet Rianto M Si
  5. Drs H Mudzakir MM
  6. Drs Najib Anwar MH
  7. Mr H Rauwan Harhap
- The tour was at the request and insistence of Mr H Amidhan Shaberah so that approval by MUI can be given for certification.
- I paid for all airfares, accommodation, meals, and other expenses from 02/04/2006 til 08/04/2006
- Mr Sam & Mr Amin chose to return on 05/04/2006 to Indonesia and were paid a large sum of money in Australian Dollars at Melbourne Airport.
- All other persons listed above were paid a larger sum of money in Australian Dollars while in Sydney in my office as they have stayed for the whole week
- The payments in my office were in front of the Indonesian Consul and an Australian Government representative.
- Later the Indonesian consul asked me why I made these payments I told him it was at the request of Mr Amidhan.
- Mr Amidhan was paid the largest sum being the leader of the group.

and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths Act 1900 (as amended).

Subscribed and declared at Sydney
On 2 April 2012 before me.

Justice of the Peace
JP Registration No 117951
WILLIAM MURPHY



SUMPAH MOHAMED EL-MOUELHY DI DEPAN NOTARIS TELAH MENYUAP PETINGGI MUI.

6. Regarding to this agreement AHFS will give contribution to MUI for strengthening of controlling and monitoring program

This agreement is signed in Jakarta, Indonesia on 14 October 2009

Signed by and on behalf of MUI
Drs. H. Amidhan Shaberah, MUI Chairman

Signed by and on behalf of AHFS
Dr. Mohammed Lotfi, Director of AHFS



KONTRAK LABEL HALAL AHFS DENGAN MUI.





AMIDHAN (KIRI), KETUA MUI, KETIKA MENGHADIRI KONGRES MAKANAN HALAL INTERNASIONAL HFCE DI BRUSSEL, BELGIA, 23 MARET 2012.

HFCECONFRENCE.COM

lembaga halal begitu izin diberikan."

Gratis di atas kertas, tak seperti itu kenyataannya. Mouelhy punya pengalaman menyuap petinggi MUI untuk mendapat izin label. Perusahaan pria Mesir 71 tahun pemegang paspor Australia ini ingin melebarkan sayap label halal ke Indonesia, karena baru mendapat lisensi untuk produk yang diekspor ke Qatar, pada 2006.

Waktu itu, 40 persen dari 400 ribu ton kebutuhan daging sapi Indonesia dipasok dari Australia. Satu perusahaan diperkirakan mendapat pendapatan Rp 500 juta sehari dari bisnis label halal. Mouelhy mengenal petinggi MUI dan Kementerian Agama karena pada 1999 ikut mendirikan World Halal Food Council. Ia pun menjadi sekretaris pertama organisasi itu.

Pada awal 2006, Mouelhy berkunjung ke Jakarta. Ia juga mewakili enam perusahaan lain yang mengajukan lisensi. Waktu itu, urusan halal mesti mendapat izin dari Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan Majelis Ulama Indonesia. Di sebuah restoran Cina di Hotel Borobudur, Mouelhy dijamu Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin, Amidhan, dan Rauwan Harahap dari Departemen Agama.

Sesuai dengan aturan, sebelum memberikan izin, MUI akan menyurvei perusahaan pemohon untuk meninjau kelayakannya. Maka tanggal kunjungan ditetapkan pada 2-8 April 2006. "Di situ mereka meminta sangu Aus$ 300 per orang per hari," katanya. "Mahal sekali." Total ada tujuh anggota tim peninjau.

Para peninjau dijadwalkan tiba di Perth. Dari situ, perjalanan dilanjutkan ke Melbourne, baru ke Sydney, dan terakhir ke Queensland, negara bagian dengan jumlah produsen daging terbesar di Australia. Empat tempat itu adalah lokasi kantor enam perusahaan yang diwakili Mouelhy. Baru sampai Melbourne, Ma'ruf Amin dan Ichwan Sam meminta pulang. Tinggal lima orang yang berkunjung tuntas ke semua perusahaan.

Saat pamitan di bandar udara Melbourne itulah, kata Mouelhy, ia memberikan tujuh amplop uang yang jumlahnya Aus$ 26 ribu (sekitar Rp 275 juta). Dolar itu ia kumpulkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. "Amidhan mendapat jumlah paling besar," ujarnya. Kronologi peristiwa dan pernyataan menyuap itu ia buat dalam pernyataan bersumpah di depan notaris William Murphy di Sydney.

Tanpa alasan jelas, Amidhan meneken surat yang menyatakan tujuh perusahaan itu tak layak mendapat izin label halal. "Staf perusahaan Mouelhy adalah anak dan istrinya. Kantornya di rumah. Ini tak memenuhi kriteria," Amidhan memberikan alasan kepada *Tempo*. Dalam aturan MUI, kata dia, izin diberikan jika perusahaan itu sudah mendapat izin dari komunitas muslim setempat dan bersedia menyisihkan keuntungan dalam syiar Islam di wilayahnya.

Untuk Al Iman Islamic Society di Victoria, alasannya lain lagi. Perusahaan itu dianggap tak memenuhi kualifikasi karena pengadilan setempat menyatakan sertifikat halalnya bermasalah. Amer Ahmed, Direktur Al Iman, menampik alasan ini. Menurut dia, sengketa pengadilan terjadi di antara dua pemilik perusahaan. "Tak ada hubungannya dengan sertifikasi," ujarnya. Hingga kini, label halal Al Iman berlaku untuk semua negara kecuali Arab Saudi. Amer menyumbangkan Aus$ 4.000 kepada Mouelhy untuk mendapat lisensi ekspor ke Indonesia itu.

Lewat kasak-kusuk ke pengusaha-pengusaha halal di Melbourne dan Queensland, Mouelhy tahu penyebab izin itu tak turun. Amidhan dan rombongan rupanya dijamu makan malam oleh Esad Alagic, pemimpin Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV), lembaga halal terbesar di negara bagian itu, yang 60 persen labelnya untuk produk ekspor ke Indonesia. Esad dan ICCV ditunjuk MUI sebagai perwakilan di Australia.

Esad karib lama Amidhan. Orang Bosnia ini pernah membawa Amidhan berkunjung ke negaranya meresmikan sebuah perusahaan halal di sana. Ia juga pernah diajak Amidhan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di kantornya, 155 Lygon Street, East Brunswick, Victoria, terpampang foto mereka bertiga. Menurut Mouelhy, Esad tak rela ada pesaing bisnisnya di Victoria.

Masalahnya, hanya melalui Esad, izin MUI bisa gampang keluar. Seorang bekas manajer keuangan perusahaan halal menuturkan pernah mencairkan uang tunai Aus$ 50 ribu untuk dibawa bosnya ke Jakarta pada akhir 2011. Bos perusahaan ini menemui Amidhan karena diancam akan dicabut izinnya dengan tuduhan memberikan label halal lintas negara

bagian.

Esad bersedia mengantar bos perusahaan itu bertemu dengan Amidhan. Kepada bawahannya, bos itu mengatakan akan memberikan suap kepada empat orang MUI. Setelah pertemuan dengan Amidhan, pencabutan izin tak pernah benar-benar dikeluarkan. Perusahaan itu masih memberikan label halal hingga kini.

Esad tak ada di Victoria ketika disambangi ke kantornya. Menurut wakilnya, Ekrem Ozyurek, bosnya sedang mengikuti seminar halal di Brunei Darussalam. Ekrem tak menyangkal Esad punya hubungan khusus dengan Amidhan. ICCV dan MUI bahkan punya pesantren sebelas hektare di Jonggol, Jawa Barat, dan membangun masjid megah. "Saya pernah ke sana tiga tahun lalu," ujar Ekrem.

Tentang informasi Esad menjadi pelobi bagi perusahaan halal Australia dengan MUI, Ekrem ragu. Menurut dia, "Bagaimana mungkin dia mau membuka peluang perusahaan lain mendapat izin label halal, sementara kami perusahaan di bisnis yang sama."

Amidhan tak menyangkal kenal dekat dengan Esad dan ICCV sebagai wakil MUI di Australia. "Ini perusahaan besar dan bonafide serta sudah lama menggeluti label halal," katanya. Semua informasi tentang Esad dan ICCV ia benarkan, kecuali cerita Esad membawa pengusaha yang menyuapnya agar tak diberi sanksi.

Menurut Amidhan, meski ia yang meneken surat izin ataupun sanksi, keputusannya diketuk bersama tiga orang lain, di antaranya Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim. "Saya ikut memaraf keputusan-keputusan komite," ujar Lukmanul.

■ ■ ■

NAMA Amidhan tak hanya berkibar di Australia, tapi juga di Eropa. Ia tercatat duduk di Badan Penasihat Halal Food Council of Europe (HFCE) yang berkantor di Brussel, Belgia. Keterangan ini tercantum dalam presentasi seorang Direktur HFCE tentang struktur perusahaannya. Kedudukannya ini mengandung konflik kepentingan.

Melalui World Halal Food Council—yang bersidang Kamis-Jumat pekan ini di Roma, Italia—dan dipimpin Lukmanul Hakim, MUI ditahbiskan sebagai lembaga pengawas dan pengaudit lembaga-lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia. Pertimbangannya, selain merupakan lembaga ulama di negara muslim terbesar, MUI dianggap paling berpengalaman mengelola label halal.

Meski audit oleh MUI dilakukan dua tahun sekali sesuai dengan jangka waktu izin seperti di Australia, aturan di Eropa lebih longgar. Di benua ini, satu perusahaan halal bisa melayani permintaan label dari semua produsen makanan dan minuman di semua negara Eropa. Selain HFCE, lima perusahaan berkantor di Polandia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda.

Mohammad Zeshan Sadek, pendiri dan pemilik HFCE, menolak mengomentari keberadaan Amidhan di perusahaannya. Juga kabar dari orang dalam bahwa Amidhan menerima gaji rutin US$ 5.000 untuk itu. Begitu pula informasi bahwa posisi Amidhan membuat label-label halal yang dikeluarkan HFCE tak pernah diaudit MUI.

Karena tak pernah diaudit MUI, produk-produk yang mengandung gelatin babi tetap diberi label halal oleh HFCE. Misalnya produk obat dari Belgia yang ternyata mengandung *trypsin*, senyawa yang berasal dari babi, pada 6 Desember 2013. "Semua informasi yang Anda tanyakan sangat sensitif dan bersifat rahasia," kata Sadek melalui surat elektronik, menjawab permintaan konfirmasi *Tempo*.

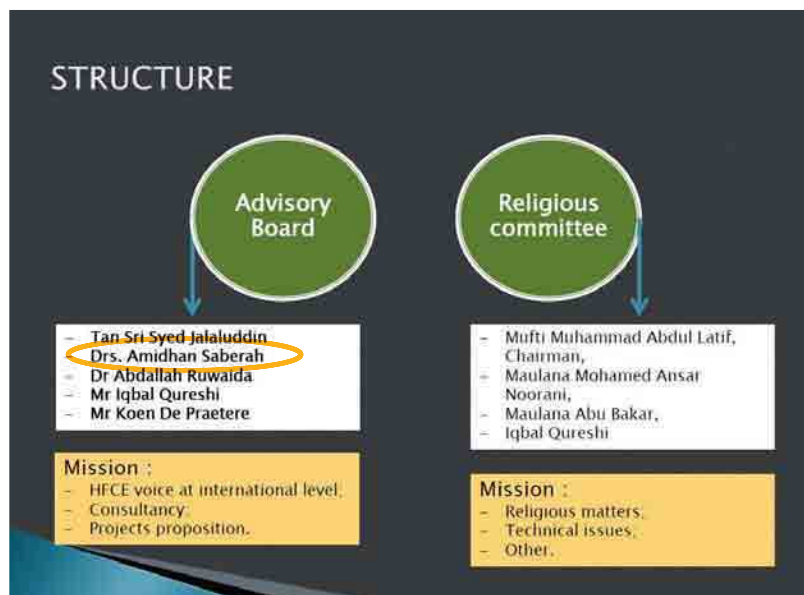
Sadek menyatakan uang yang diberikan kepada Amidhan merupakan honor pembicara dalam rapat tahunan konferensi halal di Belgia. "Ia dibayar sama seperti pembicara lain," kata pengusaha Malaysia yang tinggal di Chicago, Amerika Serikat, ini.

Amidhan juga menyangkal punya posisi di HFCE. Seraya berseloroh, ia mengatakan akan menagih gajinya sebagai penasihat jika bertemu dengan Sadek dalam konferensi makanan halal di Roma, akhir pekan ini. Ketika *Tempo* menunjukkan surat elektronik pengiriman nomor rekening dolar di Bank CIMB cabang Sudirman atas namanya, Amidhan menjawab, "Mungkin itu untuk honor menjadi pembicara. Paling banter US$ 1.000."

● BAGJA HIDAYAT (JAKARTA), KARTIKA CANDRA (AUSTRALIA), ASMAYANI KUSRINI (BELGIA)

PRESENTASI HFCE YANG MENYEBUTKAN BAHWA AMIDHAN ADALAH ANGGOTA ADVISORY BOARD.





DUA LABEL DAGING FLEMINGTON

Daging yang dinyatakan halal diolah di tempat yang sama dengan produk nonhalal di Melbourne. Tetap mendapat sertifikat berstandar MUI.

POTONGAN daging meluncur di sela pisau pemotong pabrik pengolahan di Flemington, kawasan suburban, barat laut Melbourne, Australia. Berbentuk dadu-dadu besar, daging berwarna merah muda itu terlihat segar. Potongan daging babi itu lalu meluncur ke lempeng aluminium. Mesin pemotong terus mendengung.

Seorang pekerja, yang mengenakan baju kerja panjang dan celana putih dengan sepatu bot, memastikan potongan-potongan daging kualitas prima itu masuk pisau pemotong pada posisi yang tepat. Rekannya berdiri di ujung mesin, sibuk memilah-milah tumpukan daging babi yang telah terpotong. Potongan yang berselimut lemak putih ia sisihkan.

"Ini tidak bagus karena berlemak," ujarnya kepada seorang calon pembeli, Senin menjelang tengah hari dua pekan lalu. Ia menunjukkan potongan daging yang berbalur-balur lemak putih.

Di selasar yang sama, pekerja lain berdiri menghadap meja aluminium. Ia tekun memotong-motong daging sapi dalam irisan tipis lebar. Cekatan dan hati-hati. Potongan berwarna merah cerah yang sedang ia tangani merupakan daging sapi *wagyu* kualitas premium, yang umumnya pesanan restoran Jepang di berbagai negara.

Perusahaan pengolah yang berdiri sejak 1981 itu membeli daging dari berbagai tempat penyembelihan hewan di Victoria. Daging itu lantas dipotong sesuai dengan pesanan pasar dan dikemas sebelum dikirim ke pembeli. Daging yang diberi label halal diekspor ke Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah. Salah satu fasilitas pengolahan di Queensland dikhususkan buat memproses daging halal.

Yang jadi soal, "daging halal" diolah di tempat yang sama dengan "daging nonhalal"–hal yang terlarang menurut banyak ahli hukum Islam. Pabrik pengolah di Flemington itu digunakan untuk memproses daging nonhalal, termasuk babi, sejak siang hingga sore. Daging dengan klasifikasi halal diolah di situ pada pagi harinya. Pada siang ketika daging babi diolah, Selasa dua pekan lalu, kotak-kotak daging domba dengan label halal berderet di sepanjang sisi ruangan.





EKREM OZYUREK, VICE CHAIRMAN ICCV AUSTRALIA.





MOHAMED EL-MOUELHY, PEMIMPIN HALAL CERTIFICATION AUTHORITY AUSTRALIA.

Mengacu pada standar halal yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia, daging babi dan daging halal tidak boleh diproses di tempat yang sama. Sebab, menurut Ketua MUI Amidhan Shaberah, pemrosesan di tempat yang sama akan mengkontaminasi produk halal dengan zat-zat produk nonhalal. "Harus di tempat terpisah. Bersebelahan saja tidak boleh," katanya kepada *Tempo*, Rabu pekan lalu.

Toh, pabrik pengolahan daging di Flemington telah mendapatkan sertifikat halal dari Islamic Coordinating Council of Victoria atau ICCV, lembaga pemberi sertifikasi halal yang disetujui MUI untuk wilayah negara bagian itu. ICCV juga ditunjuk MUI sebagai satu-satunya lembaga koordinator untuk sertifikasi halal bagi produk-produk Australia yang masuk ke Indonesia.

Manajer administrasi sekaligus auditor untuk ICCV, Sidki Guzel, mengakui lembaganya memberi sertifikasi halal untuk perusahaan di Flemington itu. Menurut dia, fasilitas pengolahan daging di Flemington memproses daging untuk pasar domestik serta tidak mengolah daging babi dan daging halal di satu atap. Auditor ICCV, kata dia, secara rutin mengecek standar di perusahaan atau tempat penyembelihan yang mendapat sertifikasi halal dari lembaganya.

Guzel mengatakan setiap negara memiliki standar yang berbeda dalam soal halal. Ketika memberikan sertifikasi, ICCV mengacu pada persyaratan yang ditetapkan tiap-tiap negara. Ia memastikan tempat pemrosesan di Flemington tidak mengekspor produknya ke Indonesia. "Saya memastikan produk yang dikirim ke Indonesia diproses dengan standar halal. Sama sekali tidak ada percampuran. Tidak ada produk untuk Indonesia yang diproses di bawah satu atap dengan produk nonhalal," ujarnya.

Bukan kali ini saja ICCV mendapat masalah tentang sertifikasi halal. Dua tahun lalu, organisasi yang dipimpin Esad Alagic ini juga diprotes komunitas muslim Australia setelah memberikan sertifikasi halal untuk gerai restoran cepat saji Hungry Jack's di daerah suburban Tullamarine. Padahal menu yang disajikan di gerai itu tak jauh berbeda dengan yang ada di gerai-gerai lain, termasuk daging babi. Belakangan pemilik gerai diminta mencabut klaim halal itu oleh kantor pusat Hungry Jack's.

Guzel juga membantah kabar bahwa ICCV melakukan keteledoran. Menurut dia, sertifikasi halal yang diberikan ICCV untuk gerai itu sudah sesuai dengan prosedur. Guzel justru menyalahkan pemimpin Hungry Jack's, yang menurut dia tak senang salah satu gerainya mendapat label halal. "Ini persaingan bisnis saja. Mereka iri karena gerai halal mena-

FOTO-FOTO: TEMPO/KARTIKA CANDRA

rik banyak pelanggan," katanya.

ICCV salah satu organisasi sertifikasi terbesar di Australia. Menurut wakil ketuanya, Ekrem Ozyurek, lembaga itu didirikan gabungan sebelas komunitas muslim di Australia pada 1991. Saat ini ICCV mempekerjakan 140 tenaga penyembelih hewan dan berencana menambahnya menjadi 250 orang. Peningkatan kebutuhan penyembelih menunjukkan kenaikan jumlah sertifikat yang diberikan. Sebab, untuk setiap sertifikasi kepada rumah pemotongan hewan, ICCV berkewajiban menempatkan penyembelihnya di sana.

Menurut Mohamed El-Mouelhy, pemimpin Halal Certification Authority Australia yang mengaku sebagai karib Esad, ICCV mendapat keistimewaan karena kedekatan pemimpin lembaga itu dengan Amidhan. Karena kedekatan ini pula MUI tak pernah melakukan audit pada ICCV.

Kabar kedekatan Amidhan dan Esad Alagic bukan hal baru bagi pelaku bisnis sertifikasi di Australia. Perkenalan keduanya terbuhul sejak Amidhan belum menjadi Ketua MUI. Menurut Mouelhy, Esad dikenalkan dengan Amidhan oleh salah seorang pejabat di Kementerian Agama. Pria berkebangsaan Bosnia ini kerap berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Amidhan. Jika Esad datang berkunjung, Amidhan sendiri yang menjemputnya ke Hotel Borobudur, tempat Esad biasa menginap. Sebaliknya, jika Amidhan bertandang ke Australia, Esad selalu menjamu dan membiayai keperluannya.



KANTOR ICCV DI 155 LYGON STREET EAST BRUNSWICK, VICTORIA, AUSTRALIA.

Esad pernah diundang ke acara peresmian pondok pesantren yang dihadiri pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jawa Timur. Esad berfoto bersama Presiden pada acara itu, yang kemudian dipajang di ruang kantor ICCV, 155 Lygon Street, East Brunswick, Victoria.

Menurut Mouelhy, sebelumnya Esad pernah diajak Amidhan bertemu dengan Presiden di Istana Negara. Esad, yang ketika itu tak siap menghadiri acara resmi, tak membawa pakaian yang pantas. Amidhan pun memaksanya membeli setelan jas. Esad juga pernah mengundang Amidhan berkunjung ke Bosnia, menilik perusahaan sertifikasi halal yang didirikan Esad di negara asalnya itu.

Amidhan mengaku kenal dekat dan berhubungan baik dengan Esad. Menurut dia, undangan mengikuti acara yang dihadiri Presiden merupakan hal biasa saja. "Kami semua memang dekat dan baik dengan siapa saja," katanya.

● KARTIKA CANDRA (MELBOURNE)

PENGAKUAN 'DOSA' PEMAIN UTAMA

Pemalsuan label halal daging dari Amerika Serikat dimaafkan Majelis Ulama. Melibatkan importir terbesar.

PADA Juni empat tahun silam, ketika masih menjadi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, Turni Rusli Syamsudin menerima sepucuk surat yang masih diingatnya hingga kini. Layang itu dikirim Majelis Ulama Indonesia kepada Kepala Badan Karantina, dan salinannya ditembuskan ke instansi dia.

Menurut Turni, isi surat dari Majelis itu menyebutkan sertifikat halal daging sapi milik importir CV Sumber Laut Perkasa tak sah. Berdasarkan surat itu, Kementerian Pertanian menerbitkan surat edaran untuk mengawasi daging milik Sumber Laut. "Supaya tidak diedarkan," kata Turni, yang pensiun mulai 2013, Rabu pekan lalu.



KONTAINER BERISI DAGING IMPOR ASAL AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU MENUMPUK DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK, 2011.

TEMPO/RETNO SULISTYOWATI

Ditandatangani Lukmanul Hakim, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika—lembaga sertifikasi halal milik MUI—surat itu menjelaskan ihwal pemalsuan sertifikat halal yang diinformasikan Halal Transactions of Omaha (HTO). Lembaga sertifikasi halal yang berkantor di Negara Bagian Nebraska, Amerika Serikat, itu menemukan sertifikat palsu berkop HTO yang dibuat Citizen Foods, Westbury, New York, eksportir penyuplai daging Sumber Laut Perkasa.

Dalam suratnya kepada Lukmanul, HTO menyebutkan Citizen Foods, yang dikelola Helena Lenawati, berkolaborasi dengan Basuki Hariman, pemilik Sumber Laut Perkasa, memalsukan puluhan sertifikat HTO pada 2007-2010. HTO memang pernah mengeluarkan 87 dokumen sertifikat halal untuk Cargill Meat Solutions di High River, Kanada, pemasok daging untuk Citizen Foods selama 2007-2009. Di lapangan, sertifikat HTO yang beredar ternyata mele-

bihi jumlah itu. Sertifikat 2010 dipastikan palsu karena HTO memutus kontrak dengan Citizen Foods pada akhir tahun sebelumnya.

"Beberapa di antara sertifikat dipalsukan langsung oleh Sumber Laut Perkasa," begitu isi surat manajemen HTO kepada Lukmanul. Beserta surat itu juga dilampirkan tujuh sertifikat halal yang disebutkan palsu. Pemalsuan dilakukan dengan meniru tanda tangan Direktur HTO Ahmad al-Absy dan mencetak stempel palsu.

Atas temuan HTO itu, MUI melayangkan surat pada 4 Juni 2010 meminta Kementerian Pertanian meninjau ulang izin impor Sumber Laut Perkasa. Turni, pejabat yang ditembusi surat MUI, memanggil Basuki Hariman. Yang dipanggil tak pernah hadir, justru mengutus beberapa karyawannya. Lalu terbitlah surat edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ke daerah agar mengawasi daging bercap Sumber Laut Perkasa.

Kabar masuknya daging sapi Amerika tanpa sertifikat halal meluas. Sorotan makin tajam kepada Basuki Hariman, yang menjadi pemain tunggal impor daging sapi dari Amerika. Sepanjang 2010, impor daging sapi tidak dibatasi. Pemerintah membolehkan impor daging dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada. Total realisasi impor daging 2010 mencapai 140 ribu ton. Dari jumlah itu, 30 persen atau 42 ribu ton berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan Basuki merupakan pemain utama daging Abang Sam ini.

Seorang narasumber yang mengetahui soal ini secara rinci mengatakan Basuki sulit berkelit dari tuduhan Halal Transactions of Omaha. Tapi sang importir tak habis akal. Ia mengutus Feni, sekretarisnya, melobi Lukmanul. Caranya: menyodorkan surat permohonan maaf kepada MUI. Dalam suratnya, Basuki berdalih penggandaan sertifikat terjadi karena kesalahan anak buahnya. Ia menyatakan telah memecat pegawai yang bertanggung jawab soal itu.

Trik ini manjur melunakkan Lukmanul. Feni pulang dengan mengantongi surat dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika yang memaafkan kesalahan Sumber Laut. Hanya berselang 17 hari, MUI mengeluarkan surat. "Pada prinsipnya permintaan maaf tersebut kami terima," begitu isi surat MUI kepada Basuki Hariman yang diterbitkan 21 Juni 2010.

Lukmanul mengatakan mengeluarkan surat itu tanpa bayaran. "Bagaimana cara bayarnya? Saya tidak kenal Basuki," ujarnya. Ia menyatakan tidak ingat telah mengeluarkan surat dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika yang memaafkan pemalsuan sertifikat halal oleh Sumber Laut Perkasa. Namun, ia menegaskan, daging yang diimpor Sumber Laut telah dicek, meski tidak melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan. "Ada yang melapor sudah bersih. Kalau begitu, ya, syukur," ujarnya Rabu pekan lalu.

Didatangi ke kantor Sumber Laut Perkasa, Kompleks Pergudangan Sunter, Jakarta Utara, Kamis pekan lalu, Basuki tak berada di tempat. Adapun Feni mengatakan perusahaannya tidak pernah memalsukan sertifikat halal milik HTO atau mendapat teguran Majelis Ulama Indonesia pada 2010. Ia pun menyebutkan Sumber Laut tak pernah memberikan pelicin kepada Lembaga Pengkajian Pangan.

Lolosnya Basuki dari jeratan sertifikat palsu ini sudah diperkirakan banyak importir daging. Sebab, Basuki telah berpengalaman pada soal yang sama. Pada akhir 2004, perusahaan Basuki dituduh melakukan impor daging ilegal. Ribuan ton daging sapi asal Amerika yang diimpor perusahaannya ketahuan berasal dari India, kawasan yang produk dagingnya dianggap rawan penyakit mulut dan kuku. Kasus ini tak pernah diusut lagi. Perusahaan Basuki tetap memperoleh hak menjadi importir resmi.

Setelah memperoleh surat pemberian maaf dari Lembaga Pengkajian Pangan, Basuki membawanya ke Turni. Ia meminta Kementerian Pertanian tak mempersoalkan lagi sertifikat halal Sumber Laut. Menurut Turni, laporan pemalsuan sertifikat halal itu batal lantaran MUI telah menerima klarifikasi Sumber Laut. "MUI memahami persoalan itu," ujarnya.

Lolos dari sorotan MUI membuat bisnis perusahaan Basuki tak pernah meredup. Pada 2011, ketika sistem kuota impor daging sapi diterapkan Kementerian Pertanian, ia memperoleh sebagian besar kuota: 60 persen dari total jatah impor yang dibagikan ke pelbagai perusahaan.

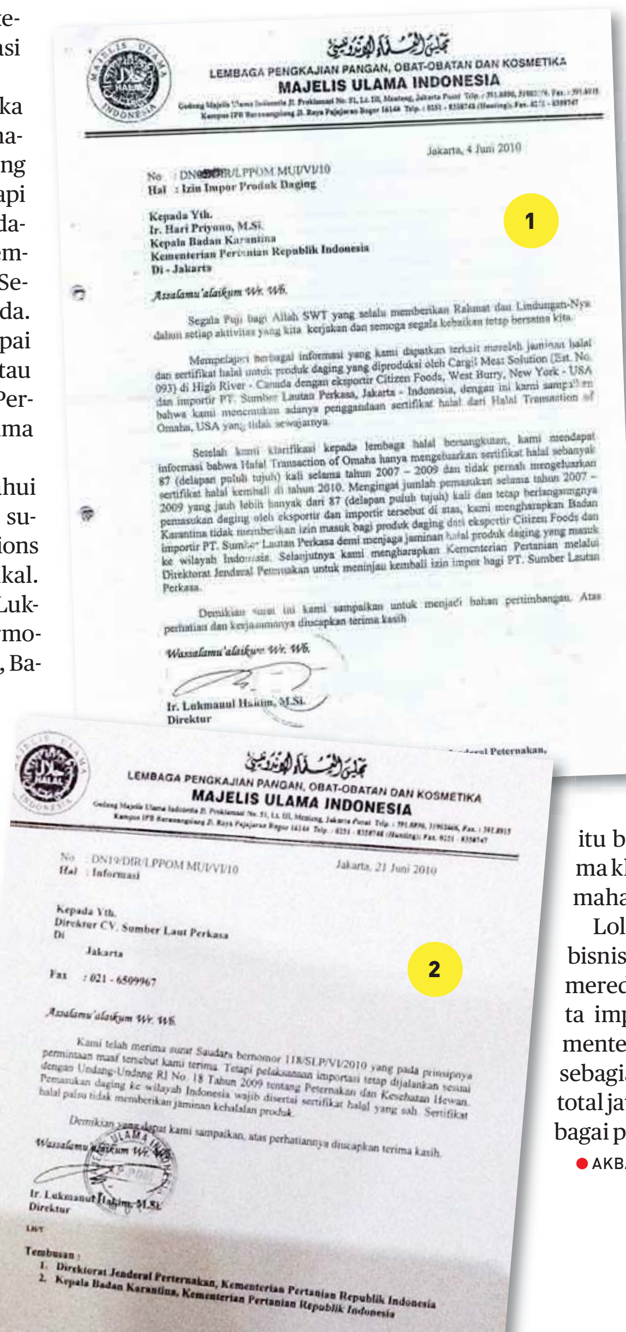
● AKBAR TRI KURNIAWAN, APRILIANI GITA FITRIA

1

SURAT MUI YANG MENYATAKAN SERTIFIKAT HALAL DAGING IMPOR MILIK CV SUMBER LAUT PERKASA **TERINDIKASI PALSU.**

2

SURAT MUI MEMAAFKAN BASUKI HARIMAN, PEMILIK CV SUMBER LAUT PERKASA, YANG MEMALSUKAN SERTIFIKAT HALAL UNTUK DAGING DAN JEROAN ASAL AMERIKA SERIKAT.



LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Jakarta, 4 Juni 2010

No : DN[redacted]R/LPPOM MUI/VI/10
Hal : Izin Impor Produk Daging

Kepada Yth.
Ir. Hari Priyono, M.Si.
Kepala Badan Karantina
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Di - Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Lindungan-Nya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dan semoga segala kebaikan tetap bersama kita.

Mempelajari berbagai informasi yang kami dapatkan terkait masalah jaminan halal dan sertifikat halal untuk produk daging yang diproduksi oleh Cargil Meat Solution (Est. No. 093) di High River - Canada dengan eksportir Citizen Foods, West Burry, New York - USA dan importir PT. Sumber Lautan Perkasa, Jakarta - Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menemukan adanya penggandaan sertifikat halal dari Halal Transaction of Omaha, USA yang tidak sewajarnya.

Setelah kami klarifikasi kepada lembaga halal bersangkutan, kami mendapat informasi bahwa Halal Transaction of Omaha hanya mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali selama tahun 2007 – 2009 dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal kembali di tahun 2010. Mengingat jumlah pemasukan selama tahun 2007 – 2009 yang jauh lebih banyak dari 87 (delapan puluh tujuh) kali dan tetap berlangsungnya pemasukan daging oleh eksportir dan importir tersebut di atas, kami mengharapkan Badan Karantina tidak memberikan izin masuk bagi produk daging dari eksportir Citizen Foods dan importir PT. Sumber Lautan Perkasa demi menjaga jaminan halal produk daging yang masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya kami mengharapkan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan untuk meninjau kembali izin impor bagi PT. Sumber Lautan Perkasa.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.
Direktur

...Jenderal Peternakan,

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

No : DN19/DIR/LPPOM MUI/VI/10
Hal : Informasi

Jakarta, 21 Juni 2010

Kepada Yth.
Direktur CV. Sumber Laut Perkasa
Di
Jakarta

Fax : 021 - 6509967

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami telah merima surat Saudara bernomor 118/SLP/VI/2010 yang pada prinsipnya permintaan maaf tersebut kami terima. Tetapi pelaksanaan importasi tetap dijalankan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemasukan daging ke wilayah Indonesia wajib disertai sertifikat halal yang sah. Sertifikat halal palsu tidak memberikan jaminan kehalalan produk.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.
Direktur

LH/T

Tembusan :
1. Direktorat Jenderal Perternakan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2. Kepala Badan Karantina, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

BISNIS GLOBAL PETINGGI MAJELIS

MAJELIS Ulama Indonesia sebenarnya menggratiskan izin buat perusahaan pemberi label halal di sejumlah negara. Hanya ada ketentuan bahwa lembaga-lembaga itu mesti "menyumbang syiar Islam di lingkungannya". Izin tanpa tarif ini justru menjadi peluang "suap" kepada petinggi Majelis.

Enam perusahaan pemberi label halal di Eropa berpusat di Belgia, Prancis, Belanda, Jerman, Inggris, dan Polandia. Amidhan Shaberah tercatat sebagai salah satu penasihat Halal Food Council of Europe, yang berkantor di Brussel, Belgia. Sumber internal menyebutkan dia mendapat gaji US$ 5.000 atau sekitar Rp 60 juta per bulan. Jabatan Amidhan menimbulkan konflik kepentingan karena MUI mengaudit dan mengawasi lembaga-lembaga pemberi label halal tersebut.

01 Pengusaha meminta izin kepada MUI agar ditetapkan sebagai organisasi pemberi label halal di luar negeri. Resminya tak ada biaya pengurusan.

02 MUI meninjau perusahaan, yang dibebani semua biaya perjalanan.

03 MUI memutuskan menerima atau menolak permohonan izin. Wakil perusahaan yang permohonannya diterima akan menandatangani kontrak bersama Ketua MUI Amidhan Shaberah.

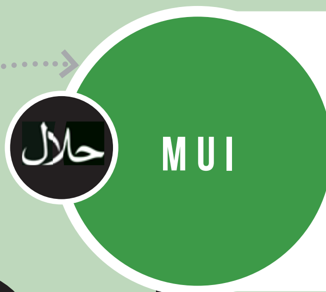
> "Tidak ada kontrak, kami putus hubungan dengan lembaga halal setelah izin diberikan."
> —AMIDHAN SHABERAH

04 Perusahaan yang permohonannya diterima akan memberikan label halal untuk produk makanan dan minuman yang masuk Indonesia.

05 Makanan atau bahan makanan yang mendapat label halal dari perusahaan yang diakui MUI bisa masuk Indonesia.

Di Australia, ada enam lembaga pemberi label halal yang diakui MUI, dengan wilayah kerja dibatasi per negara bagian. Majelis ulama negara lain membolehkan label halal diberikan kepada produsen daging lintas negara bagian. MUI menetapkan izin berlaku selama dua tahun, yang mesti diperpanjang mendekati kedaluwarsa. Perpanjangan turun setelah perusahaan memberikan "hadiah" Aus$ 30-50 ribu untuk petinggi lembaga itu.

- Australian Federation of Islamic Councils Inc, New South Wales
- Global Halal Trade Centre Pty Ltd, Victoria
- Halal Certification Council, Queensland
- Islamic Coordinating Council of Victoria
- Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc, New South Wales
- Western Australia Halal Authority





MUI didirikan di Jakarta pada 26 Juli 1975 oleh 62 orang dari 26 provinsi, yang mewakili organisasi kemasyarakatan Islam dan lembaga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Pangan 1976 dan Lembaga ini menerima bantuan pemerintah sebesar Rp 10 miliar pada 2014.



TERIMA

TOLAK

03 02 01

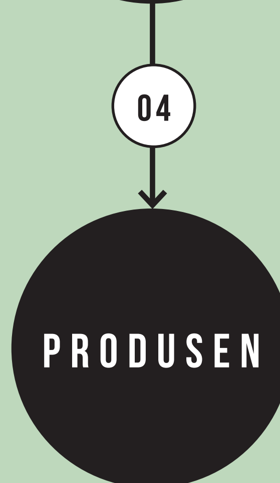
Syarat Perusahaan Halal

1. Didirikan organisasi Islam yang mendapat dukungan imam masjid setempat atau komunitas muslim yang anggotanya paling kurang 40 orang dan menyumbang kegiatan syiar Islam di lingkungannya.
2. Memiliki kantor permanen dan staf tetap.
3. Organisasi Islam tersebut memiliki komisi fatwa yang anggotanya terdiri atas tiga ulama yang paham hukum Islam dan dua ilmuwan yang berpengalaman menguji pejagalan, restoran, pabrik, dan industri yang mengolah zat aditif.
4. Memiliki prosedur operasi standar proses sertifikasi yang meliputi administrasi, pengujian pabrik, audit, dan prosedur komisi fatwa.
5. Arsip administrasi harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan proses audit.
6. Memiliki jaringan luas, terutama dengan komunitas World Halal Food Council dan lembaga perdagangan produk halal dunia.
7. Memiliki kapabilitas bekerja sama dengan MUI dalam mengawasi produk halal di Indonesia.



Islamic Coordinating Council of Victoria **(ICCV)**, yang berdiri sejak 1991, dimiliki Esad Alagic dan ditunjuk menjadi perwakilan MUI di Australia. Sebanyak 60 persen daging yang diberi label halal oleh ICCV diekspor ke Indonesia. Sisanya ke Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara lain di Timur Tengah. Pengusaha label halal baru atau yang akan memperpanjang izin di Australia kerap meminta Esad mempertemukan mereka dengan Amidhan Shaberah.

04



» Dalam kontrak antara perusahaan label halal dan MUI, tercantum ketentuan bahwa perusahaan tersebut bersedia memberikan kontribusi kepada MUI dalam penguatan dan pengawasan program halal.
» Modal untuk mendirikan perusahaan minimal Aus$ 120 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar.

Bisnis Gurih Label
Perusahaan pemberi label halal umumnya melayani sepuluh pejagalan. Satu pejagalan bisa menyembelih 1.500 sapi dan 2.000 kambing per hari.

Sapi
» Ongkos potong: Aus$ 3 per ekor
» Kemasan: 15 kotak per ekor
» Harga per kotak: Aus$ 25 sen
» Tarif label halal: Aus$ 90 sen per kotak

Kambing
» Ongkos potong: Aus$ 30 sen per ekor
» Kemasan: 4-5 kotak per ekor
» Harga kotak: Aus$ 25 sen
» Tarif label halal: Aus$ 30 sen per kotak

05



Syarat halal:
» Penyembelih beragama Islam dan membaca basmalah.
» Ruang penyembelihan dan pengepakan dipisahkan antara produk halal dan nonhalal.

NASKAH: BAGJA HIDAYAT, SUMBER: MUI, PENELUSURAN TEMPO

AMIDHAN SHABERAH:

BUKAN PENYELENGGARA NEGARA, SAYA BOLEH TERIMA GRATIFIKASI



TEMPO/ADITIA NOVIANSYAH

MENGGUNAKAN iPhone 5, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah memanggil sopir pribadinya. Pada Rabu petang itu, ia punya jadwal terapi saraf bersama istrinya. Sejak pagi pada Rabu pekan lalu, ia berada di Grand Hyatt, hotel mewah di jantung Jakarta, bertemu dengan tamu-tamu asing, sebelum menerima wawancara dengan *Tempo* pada sore harinya.

Banyak informasi beredar seputar sepak terjang laki-laki Banjarmasin 75 tahun ini. Ia dikabarkan memainkan pemberian izin sertifikasi halal perusahaan di luar negeri, yang sebenarnya gratis, dengan meminta uang ribuan dolar. Untuk perusahaan yang sudah mendapat izin, ia mengancam akan mencabut izinnya karena melanggar aturan MUI. Banyak pengusaha bercerita ini modus supaya ancaman itu ditukar dengan dolar.

Sejatinya, keputusan memberikan izin atau mencabut izin ditentukan empat orang. Tapi posisi Amidhan sebagai ketua yang membidangi sertifikat halal membuat tuduhan itu paling deras mengarah kepadanya. Malang-melintang sebagai birokrat dengan jabatan terakhir Direktur Jenderal Pembinaan dan Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama pada 1996, ia masuk MUI setelah pensiun.

Setelah bolak-balik ia menelepon sopirnya, Toyota Alphard hitam terlihat mendekat ke lobi hotel. Amidhan buru-buru pamit setelah memberikan dua jam wawancara didampingi Lukmanul Hakim, Kepala Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, di Fontaine Lounge, lantai 2 Grand Hyatt. "Seumur-umur, baru kali ini saya memberikan wawancara blakblakan begini," katanya.

Setelah wawancara itu, ia bolak-balik menelepon, mengklarifikasi isu-isu yang menerpanya. Siang menyangkal sebuah pertemuan, sore mengakui, lalu bercerita panjang-lebar tentang latar belakang isu suap yang merubung lembaganya itu.

Banyak pengusaha di luar negeri mengaku dimintai uang oleh Anda untuk mendapat izin usaha label halal....

Sekarang sudah *online*. Kami memeriksa yang sudah mendaftar dengan survei ke lapangan. Hasil Rapat Koordinasi Nasional MUI 2003 menetapkan tujuh syarat izin lembaga halal, antara lain punya tiga ulama dan dua ilmuwan sebagai auditor, membantu masjid dan madrasah di wilayahnya, serta terdaftar sebagai anggota World Halal Food Council.

Berapa tarifnya?

Gratis. Halal itu kan agama, masak harus bayar? Mereka hanya diminta membantu masjid atau sekolah Islam di lingkungan kantornya.

Tapi mereka menetapkan tarif kepada produsen makanan dan minuman....

Setelah izin keluar, kami tak lagi punya hubungan dengan lembaga itu, kecuali saat audit dua tahun sekali. Ini memang diprotes Australia. Ada tarif karena mereka kan harus menggaji karyawan, supervisor, jagal, sewa kantor, dan lain-lain. Setiap lembaga menetapkan harga berbeda-beda sehingga timbul perang tarif. Di sana ada persaingan pengusaha Turki dan Libanon. Kami sarankan ada standardisasi.

(**Lukmanul Hakim**: Sebetulnya itu sudah disiasati dengan aturan izin lembaga per negara bagian mulai 2006. Tujuannya agar tak berantem sesama mereka. Malu kita jadinya kepada pemerintah Australia, yang bukan Islam.)

Ketika MUI mengaudit, siapa yang mengongkosi?

Izin itu berlaku dua tahun. Kami audit apakah mereka memberikan label halal yang benar kepada produsen sesuai dengan syariah. Karena kami lembaga nirlaba dan tak ada biaya, mereka yang harus menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama di sana. Kalau perjalanannya jauh, saya minta pesawat kelas bisnis karena sudah tua.

Ada honor?

Tidak ada.

(**Lukmanul Hakim**: Dulu Badan Standardisasi Nasional mengusulkan MUI menetapkan honor audit, tapi ditolak. Jadi *lump sum* saja.)

Kami mendapat kontrak lembaga halal dengan MUI dan disebutkan mereka mesti memberikan kontribusi

kepada MUI. Apa maksudnya?

Tidak ada kontrak. Seperti asuransi saja harus pakai kontrak. Kalaupun ada, berarti itu palsu. Yang menentukan izin untuk lembaga halal itu empat orang: saya, Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI, Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, serta Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Lukmanul Hakim. MUI itu hanya kebijakannya, pelaksananya itu Lukman.

(**Lukmanul Hakim**: Dalam setiap izin, saya hanya memaraf. Penanda tangannya Pak Amidhan dan Sekretaris Jenderal.)

Anda disebutkan menyerahkan sejumlah rekening pribadi ke lembaga halal itu?

Tidak ada, fitnah itu. Bodoh saya melakukan itu. Fitnah seperti itu sudah sering saya dengar.

Uang dari Mohammed Lotfi, Kepala Australian Halal Food Services?

Tidak ada. Tunjukkan saja buktinya. AHFS itu sudah dicabut izinnya karena memberikan label halal kepada pemotongan hewan yang melanggar syariah. Ada videonya. Ulama Malaysia yang merekam. Karena itu, merekalah yang mencabut izin AHFS lebih dulu. Lalu dia datang bersama wakilnya, Ali Chawk, bertemu dengan saya. Mereka bilang mau tobat. Saya terima dan mereka membuat perusahaan baru, Halal Certification Council.

Kok bisa? Bukankah staf dan prosesnya tetap sama, hanya ganti nama?

Mereka berjanji tak akan lagi melanggar.

Kabarnya, mereka melobi agar izin tak dicabut dengan memberi uang....

Tidak ada. Fitnah itu. Lotfi ini kecewa karena saya tetap memberi sanksi AHFS.

Cerita lain. Ada pengusaha, Mohamed El-Mouelhy, yang mengaku memberi Anda Aus$ 26 ribu untuk mendapat izin....

Cerita Mouelhy itu 20 tahun lalu. Dia kecewa karena tak didukung mendirikan World Halal Council. Negara-negara itu lebih memilih bergabung dengan World Halal Food Council, yang sekarang dipimpin Pak Lukman. Karena itu, dia cerita fitnah penyuapan ini.

Ini kejadiannya tahun 2006....

Tidak ada. (Sejam kemudian, ia menelepon.) Ternyata pertemuan itu ada. Saya diundang ke Australia. Tapi itu bersama Kementerian Agama. Ada tujuh orang. Karena itu, semua biaya ditanggung APBN. Omong kosong itu omongan Mouelhy. Lagi pula, kalaupun ada buktinya, saya kan bukan penyelenggara negara, boleh menerima gratifikasi.

Lalu izin untuk Mouelhy diberikan?

Tidak. Saya lihat kantor Mouelhy itu di rumah. Anak dan istrinya jadi direktur. Saya tak memberikan izin. Lalu Al Iman Islamic Society ternyata sertifikasinya bermasalah. Nah, karena dua hal ini mungkin dia marah kepada saya sehingga menyebarkan khayalan memberikan uang itu.

> **Tunjukkan saja buktinya. AHFS itu sudah dicabut izinnya karena memberikan label halal kepada pemotongan hewan yang melanggar syariah. Ada videonya. Ulama Malaysia yang merekam. Karena itu, merekalah yang mencabut izin AHFS lebih dulu.**





LUKMANUL HAKIM

Dia sampai membuat pernyataan di bawah sumpah....

Ah, orang kalap bisa melakukan apa saja, kan?

Menurut Mouelhy, izin tak diberikan karena Anda bertemu dengan Esad Alagic, rival Mouelhy dalam bisnis label halal....

Ah, tidak ada. Saya memang dekat dengan Esad. Oleh Ketua MUI Din Syamsuddin, ia ditetapkan sebagai perwakilan MUI di Australia.

Bukankah itu konflik kepentingan karena Islamic Coordinating Council of Victoria, yang dipimpin Esad, seharusnya diawasi MUI?

Itu tadi, kami terbatas mengawasi. Tak ada anggaran mengaudit. Dibuat perwakilan supaya efektif saja.

Ada juga cerita izin diberikan jika melalui Esad dengan memberi suap....

Wah, fitnah apa lagi itu? Tidak ada.

Modus Anda mengancam akan mencabut izin sehingga pengusahanya datang memohon izin tak dicabut dengan membawa uang. Benar?

Tidak ada. Izin dan pencabutan itu kewenangannya ada di empat orang, bukan saya sendiri.

Selain di Australia, Anda disebut menjadi penasihat Halal Food Council of Europe....

Ha? Informasi dari mana itu? Itu *ngaku-ngaku* saja kali. Tidak boleh saya menjadi penasihat.

Informasinya bisa dicari dengan gampang di Internet....

(**Lukmanul Hakim**: Ini serius karena bisa mengarah pada tuduhan konflik kepentingan.)

Itu isunya. Dengan Anda menjadi penasihat, HFCE tak pernah diaudit karena Anda mendapat gaji tetap....

Kalau benar seperti itu, akan saya tagih jika bertemu. Kurang ajar sekali. Mungkin honor menjadi pembicara. Saya memang berteman dekat dengan pemiliknya. Tapi tak ada hubungan sama sekali. Tak boleh.

Mengapa MUI bisa berkuasa atas lembaga halal sebagai pengawas dan auditor?

Karena Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika itu punya 600 ilmuwan yang berpengalaman. MUI juga sudah lama dan paling paham soal halal, selain sebagai lembaga ulama dari negara muslim terbesar.

MUI ini organisasi masyarakat. Dari mana sumber pendanaan?

Ada bantuan dari APBN. Tahun ini Rp 10 miliar, tapi berdasarkan program (yang diajukan). ●

TEMPO/ADITIA NOVIANSYAH